

KRISIS UKRAINA: TAWARAN RESOLUSI KONFLIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN GLOBAL

Ziyad Falahi

Abstrak

Krisis Ukraina yang terus memburuk telah menyita perhatian dunia. Krisis tersebut tidak saja menyajikan konflik militer antara Rusia dan Ukraina yang telah menimbulkan dampak pada hancurnya kota-kota dan infrastruktur di Ukraina serta krisis kemanusiaan, tetapi juga telah menimbulkan dampak pada perekonomian global. Dampak krisis Ukraina terhadap perekonomian global tersebut dikaji secara singkat melalui tulisan ini. IMF mengingatkan, dampak terhadap ekonomi global akan makin parah jika konflik antara Rusia dan Ukraina terus meningkat. Risiko bagi ekonomi Asia juga akan muncul jika harga minyak terus naik, karena ketegangan geopolitik akan membebani prospek ekonomi Asia melalui berlanjutnya kenaikan harga minyak dan komoditas lain, kondisi keuangan dan kepercayaan perusahaan, serta aktivitas perdagangan. Dialog perlu didorong dan dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan permanen, karena konflik yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina dengan dampak yang ditimbulkannya, termasuk terhadap perekonomian global, akan merugikan banyak pihak. Masyarakat internasional, termasuk parlemen melalui jejaring diplomasinya, harus ikut mengupayakan terwujudnya perdamaian Rusia-Ukraina.

Pendahuluan

Krisis Ukraina terus memburuk sejak invasi Rusia ke negara itu pada 24 Februari lalu. Kota Kherson di tepi Laut Hitam jatuh. Ibu kota Kiev dibombardir dan kota-kota strategis lainnya diblokade. Sebagian infrastruktur vital, termasuk reaktor nuklir Zaporizhzhia, hancur atau rusak dihantam rudal jelajah, roket, atau meriam tembak cepat.

Korban berjatuhan dan pengungsi terus meningkat sejak awal invasi. Berdasarkan berita media 6 Maret 2022, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB menyebutkan, lebih dari 330 warga sipil tewas dan hampir 700 orang terluka, serta sudah 1,5 juta orang mengungsi ke negara tetangga, tidak termasuk yang mengungsi di dalam negeri (Kompas, 7 Maret 2022).



Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dalam pidatonya yang disampaikan secara virtual di hadapan Parlemen Uni Eropa pada 28 Februari 2022 (beberapa hari setelah invasi Rusia), menegaskan bahwa prioritas negaranya adalah memastikan Ibu Kota Kiev terlindung dari gempuran hingga pendudukan pasukan Rusia. Zelensky saat itu mendesak Uni Eropa untuk membuktikan bahwa mereka memihak Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Zelensky juga menyampaikan keinginannya untuk melihat anak-anak Ukraina hidup sebagaimana mestinya, dan menyebutkan bahwa peperangan yang dia hadapi melawan Rusia adalah misi bertahan hidup (Tempo.co, 2 Maret 2022).

Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutkan bahwa serangan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina adalah untuk menetralkan “ancaman nyata” yang datang dari Kiev (ibukota Ukraina) dan NATO (Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang beranggotakan negara-negara Barat pimpinan Amerika Serikat). Rusia telah lama memprotes infrastruktur militer Barat di sepanjang perbatasannya dan aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan blok pimpinan Amerika Serikat (AS). Rusia menuntut agar Barat memberikan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa NATO tidak akan mengadakan kegiatan militer apa pun di Eropa Timur dan Ukraina. Putin juga kerap menyebut tindakan Rusia terhadap Ukraina adalah

dalam kerangka demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina, yang menurut Putin untuk melindungi orang-orang yang telah menjadi sasaran genosida rezim Kiev (Tempo.co., 24 Februari 2022).

Konflik Ukraina yang telah menyita perhatian dunia ini, tidak saja menyajikan konflik militer antara Rusia dan Ukraina yang telah menimbulkan dampak pada hancurnya kota-kota dan infrastruktur di Ukraina serta krisis kemanusiaan, tetapi juga telah menimbulkan dampak pada perekonomian global. Dampak krisis Ukraina terhadap perekonomian global tersebut dikaji secara singkat melalui tulisan ini, dengan terlebih dahulu dibahas tawaran resolusi konflik yang pernah mengemuka untuk menghentikan atau setidaknya meredakan perang Rusia-Ukraina.

Tawaran Resolusi Konflik

Di tengah krisis saat ini, pejabat Rusia dan Barat memilih sejarah yang paling sesuai dengan versi mereka. Versi Rusia, ekspansi NATO ke Eropa Timur adalah pengkhianatan terhadap komitmen Barat untuk tidak melakukannya – dibuat pada saat reunifikasi Jerman dan menjelang pembubaran Soviet. Sebaliknya, posisi Barat dengan tegas menolak argumen itu karena tidak didukung teks hukum apa pun dari periode itu. Barat menolak klaim apa pun dari Rusia untuk memiliki hak atas lingkup pengaruh khusus di antara negara-negara merdeka di ruang pasca-Soviet. Namun, jika isu utama tuntutan Presiden Rusia Vladimir Putin, baik pada pidato 21 Februari yang mengakui kedaulatan Donetsk dan Luhansk maupun dari pidato

24 Februari yang memerintahkan “operasi militer khusus” ke Ukraina, seharusnya tidak sulit untuk mengakhiri perang. Tinggal diatur pertemuan puncak untuk para pihak membuat kesepakatan baru yang mengakomodasi kepentingan mereka.

Ukraina, misalnya, sebaiknya menentukan posisinya menjadi negara penyangga atau netral dan tidak bergabung dengan NATO. Di sisi Barat, dan NATO, rencana keanggotaan Ukraina di aliansi militer itu dan blok Uni Eropa dibatalkan. NATO juga tidak memperluas keanggotaan ke negara-negara bekas Soviet lainnya. Sebagai catatan, sejak 1999 NATO telah memperluas keanggotaannya hingga Ceko, Hongaria, Polandia, Bulgaria, Lituania, Rumania, Slowakia, Slovenia, serta - dua negara yang berbatasan dengan Rusia - Estonia dan Latvia.

Sementara dari sisi Rusia, dilakukan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina dan tidak lagi menekan atau menginvasi negara-negara tetangganya. Menjadikan Ukraina penyangga yang netral antara kekuatan Barat dan Rusia di Timur bisa menurunkan ketegangan. Namun, bagaimana dan siapa yang memulainya? Bisakah itu diwujudkan untuk meredakan perang? Meski terlambat, saatnya AS dan Barat berjiwa besar. Mengapa AS selaku pemimpin NATO cenderung menunggu sampai perang menghancurkan segalanya untuk memimpin perundingan?

Michael McFaul, dalam opininya di *Foreign Affairs*, 11 Februari 2022, menawarkan solusi untuk menghentikan atau mencegah perang. Pada era Perang

Dingin, kesepakatan dengan Uni Soviet dapat dilakukan. Mengapa sekarang tidak? Dialog masih sangat terbuka untuk menghasilkan kesepakatan permanen. Hanya dengan membuat pakta yang komprehensif, perang bisa dicegah. Jika Putin mengisyaratkan komitmen untuk bernegosiasi, Biden dan mitra Eropa-nya seharusnya merespons. Perlu dibuat kesepakatan baru, misalnya Helsinki 2. Perjanjian ini bisa memperbarui Kesepakatan Helsinki yang diteken saat Perang Dingin. Kesepakatan terdahulu itu terbukti dapat menstabilkan Eropa meski persaingan AS-Soviet tumbuh di bagian lain dunia.

Upaya mengakhiri krisis Ukraina ini bisa juga dipetik dari pengalaman masa lalu. Resolusi konflik untuk dunia yang lebih damai pernah dimainkan Finlandia pada awal era Perang Dingin. Netralitas Finlandia yang diabadikan dalam Perjanjian Perdamaian Moskwa tahun 1947 terbukti bisa meredakan ketegangan Barat dan Timur. Finlandia sejak itu dijamin tidak akan menghadapi invasi militer Uni Soviet. Setelah NATO dibentuk pada 1949, Finlandia pun memilih untuk tetap berada di luar NATO. Kini Rusia mengisyaratkan ingin membahas status netral Ukraina. Wacana yang berkembang pun memunculkan pemikiran bahwa NATO sebaiknya memberikan jaminan bahwa Ukraina tidak akan menjadi anggota NATO. Kesalahan AS dan sekutu Barat-nya adalah mengabaikan tuntutan Putin dan itu menjadi batu sandungan bagi upaya untuk melakukan resolusi konflik.

Dampak Perang terhadap Perekonomian

Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan negara-negara di dunia untuk mewaspadai dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian. IMF mengingatkan, dampak terhadap ekonomi global akan makin parah jika konflik antara Rusia dan Ukraina terus meningkat. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyatakan, dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat perang Rusia-Ukraina saat ini sudah sangat serius. Harga energi dan komoditas, termasuk gandum dan biji-bijian, telah melonjak. Hal ini menambah tekanan inflasi sebagai dampak dari terganggunya rantai pasok. Dampak akan dirasakan betul oleh rumah tangga miskin yang sebagian besar penghasilannya hanya untuk belanja makanan dan bahan bakar (Republika, 7 Maret 2022). Oleh karena itu, IMF meminta otoritas moneter di setiap negara terus memantau kenaikan harga-harga di level internasional terhadap inflasi domestik. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan respons yang tepat

Serangan Rusia disinyalir akan memperlambat perekonomian Eropa karena harga energi yang naik tinggi. Harga gas alam yang tinggi sebagai sumber energi telah meningkatkan tarif dasar listrik negara-negara Eropa. Dengan kata lain, sektor konsumsi yang berkaitan dengan hajat hidup warga menjadi semakin tertekan. Perang tersebut telah membuat gas menjadi momok serius bagi warga berpenghasilan rendah. Bahkan secara global, pasar keuangan tengah mengalami masa *shock therapy* karena bank-bank sentral siap melawan kenaikan

inflasi dengan cara menaikkan suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi tersebut diprediksi akan memperlambat belanja dan risiko tekanan bagi ekonomi secara umum.

Yang menimbulkan kekhawatiran juga adalah sanksi Barat terhadap Rusia, karena implikasinya sangat besar. Sebagaimana diberitakan media, banyak perusahaan asing dan internasional langsung menarik bisnis mereka dari Rusia. Apple, misalnya, mengumumkan akan berhenti menjual iPhone dan produk populer lainnya di Rusia. Boeing dan Airbus menghentikan suplai suku cadang pesawat dan layanan bagi maskapai penerbangan Rusia. Barat juga mengambil tindakan terhadap bank sentral Rusia, dan mengakibatkan bank tersebut tidak dapat memperoleh akses ke sebagian besar cadangan devisa senilai 630 miliar dollar AS.

Putin bisa melancarkan balasan setiap saat, mulai dari menghentikan aliran gas negaranya ke Eropa hingga yang paling ekstrem menggunakan senjata nuklir. Merespons tindakan Moskwa, Barat juga menyiapkan balasan berikutnya. Semangat kedua pihak adalah saling merespons dengan tindakan yang bisa jadi merusak dan tidak rasional. Implikasi jangka panjang dari situasi ini akan menakutkan. Semakin banyak aksi balas itu berlanjut, akan semakin banyak pula negara yang berusaha menghindari ketergantungan pada keuangan Barat. Hal ini akan membuat ancaman pengucilan, seperti yang dilakukan terhadap Rusia saat ini, menjadi kurang kuat. Selain itu, situasi tersebut akan mengarah pada fragmentasi ekonomi dunia yang berbahaya.

Kekhawatiran juga muncul sebagai dampak diterapkannya sanksi Barat terhadap Rusia. Negara-negara Barat diketahui telah menjatuhkan sanksi ekonomi berlapis terhadap Rusia. Salah satu yang cukup memukul adalah dikeluarkannya Rusia dari *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* atau SWIFT. SWIFT merupakan jaringan keamanan tinggi yang menghubungkan ribuan lembaga keuangan di seluruh dunia. Dikeluarkannya Rusia dari SWIFT dianggap sebagai hukuman ekonomi terberat.

Risiko bagi ekonomi Asia juga akan muncul jika harga minyak terus naik, karena ketegangan geopolitik akan membebani prospek ekonomi Asia melalui berlanjutnya kenaikan harga minyak dan komoditas lain, kondisi keuangan dan kepercayaan perusahaan, serta aktivitas perdagangan. Ketegangan geopolitik yang berlanjut akan menghasilkan dorongan stagflasi bagi ekonomi Asia, di mana permintaan akan melemah, tetapi harga-harga lebih tinggi. Harga minyak yang lebih tinggi seolah akan bertindak sebagai pajak atas pendapatan rumah tangga sehingga menghambat pertumbuhan konsumsi.

Penutup

Konflik Rusia dan Ukraina secara global dapat dipandang sebagai sebuah proses dialektis antara agen dan struktur dalam hubungan internasional. Proses ini tergantung bagaimana para *cartel of elite*, dalam hal ini adalah Jerman, Italia, dan Perancis,

termasuk AS, merespons ini dengan mekanisme yang dialogis. Oleh karena itu, tawaran resolusi konflik dengan berbagai pendekatan yang pernah dijadikan acuan dalam menghentikan atau mencegah perang perlu dipertimbangkan. Dialog perlu didorong dan dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan permanen, karena konflik yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina dengan dampak yang ditimbulkannya, termasuk terhadap perekonomian global, akan merugikan banyak pihak. Masyarakat internasional, termasuk parlemen melalui jejaring diplomasinya, harus ikut mengupayakan terwujudnya perdamaian Rusia-Ukraina.

Referensi

- “Dunia Antisipasi Dampak Pada Ekonomi Global”, *Kompas* 26 Februari 2022, hal. 5
- “IMF: Dampak Perang Sangat Serius”, *Republika*, 7 Maret 2022, hal. 1.
- “Kronologi Konflik Rusia Ukraina, dari Aneksasi 2014 hingga Operasi Militer Putin”, *Tempo.co.*, 24 Februari 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1564404/kronologi-konflik-rusia-ukraina-dari-aneksasi-2014-hingga-operasi-militer-putin>, diakses 7 Maret 2022.
- McFaul, Michael. “How to Make a Deal With Putin”, *Foreign Affairs*, 11 Februari 2022, <https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2022-02-11/how-make-deal-putin>, diakses 7 Maret 2022.
- “Presiden Ukraina Tagih Uni Eropa Buktikan Anda Bersama Kami”, *Tempo.co.*, 2 Maret

2022, <https://dunia.tempo.co/read/1566116/presiden-ukraina-tagih-uni-eropa-buktikan-anda-bersama-kami>, diakses 2 Maret 2022.

“Tawaran Resolusi Konflik Ukraina”,
Kompas, 7 Maret 2022, hal. 4.



Ziyad Falahi
ziyad.falahi@dpr.go.id

Ziyad Falahi, M.Si., menyelesaikan pendidikan S-1 Hubungan Internasional Universitas Airlangga pada tahun 2010. Lulus S-2 Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia pada 2012. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.